

# Isu Lingkungan Hidup dalam Pilpres

## ● KHALISAH KHALID

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis WALHI

**T**anggal 17 April 2019, pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia akan digelar bersamaan dengan pemilihan umum legislatif.

Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang terpilih akan menentukan arah kebijakan Indonesia lima tahun ke depan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun lainnya. Tak terkecuali di bidang lingkungan hidup.

Sayangnya, isu lingkungan hidup belum menjadi fokus dari kedua pasangan capres dan cawapres. Visi misi kedua pasangan sudah mencantumkan soal lingkungan hidup, tetapi belum terlihat ada program aksi yang ditawarkan keduanya.

Isu-isu yang mengemuka masih soal politik identitas, jauh dari pembahasan yang berkaitan langsung dengan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Padahal, isu lingkungan hidup mendesak diangkat sebagai agenda nasional.

Sebab, persoalan lingkungan berkaitan erat dengan keselamatan masyarakat saat ini. Penggundulan hutan, misalnya, telah berdampak pada perubahan iklim menjadi ekstrem, suhu udara semakin panas, bencana alam, dan banjir di mana-mana.

Selain itu, kualitas udara memburuk, cadangan air berkurang hingga ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat naiknya permukaan air laut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melansir hingga 14 Desember 2018, kejadian bencana terjadi sebanyak 2.426 di Indonesia, yang sebagian besar masih didominasi oleh banjir, longsor, dan puting beliung dengan korban jiwa mencapai ribuan orang.

Dari 2.426 tersebut, 96,6 persen merupakan bencana hidrometeorologi. Masih luasnya kerusakan daerah aliran sungai, lahan kritis laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan menjadi penyebab tingginya bencana iklim.

Bahkan sejak tahun lalu, BNPB menyatakan, semakin meningkatnya bencana di Indonesia telah menunjukkan situasi darurat ekologis. Para elite politik seharusnya peduli dengan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang sudah hadir di depan mata ini.

Selain beragam bencana tersebut, masyarakat juga kerap terperangkap pencemaran udara akibat polusi perkotaan, serta kebakaran hutan dan ekosistem rawa gambut. Imbasnya, kesehatan masyarakat terpengaruh.

Mereka harus menanggung biaya kesehatan yang mahal karena kualitas hidup menurun yang dipicu oleh buruknya kualitas lingkungan hidup.

Sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia, Indonesia berperan besar dalam menyelesaikan akar masalah perubahan iklim global. Sebab, perubahan iklim ini sangat berkaitan dengan penggundulan hutan dan perusakan ekosistem rawa gambut secara masif akibat buruknya tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.

Karena itu, komitmen kedua pasang capres dan cawapres terhadap masalah ini menjadi sangat penting. Apalagi, sebagian besar hutan tersebut diklaim sebagai hutan negara, yang sayangnya dalam pengelolannya dikuasai oleh korporasi.

Perlu diingat bahwa jika tata kelola hutan dan lahan tidak diprioritaskan oleh kedua pasang capres, hutan yang menjadi kebanggaan Indonesia bisa terancam.

Bayangkan, setiap menit hutan habis dibabat seluas lima lapangan sepak bola untuk kepentingan industri ekstraktif, seperti perkebunan sawit, tambang, dan industri kertas.

Ironisnya, yang terkena dampak dari penggundulan hutan tersebut bukan hanya masyarakat, melainkan negara juga menderita kerugian. Kerugiannya pun tidak tanggung-tanggung, bukan hanya triliunan rupiah, melainkan juga ratusan triliun rupiah.

Kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan itu. Mengacu pada statistik resmi, kajian KPK menyebutkan, produksi kayu komersial dari hutan alam di Indonesia selama 2003-2014 secara keseluruhan mencapai 143 juta meter kubik (m3).

Dari total produksi tersebut, sebanyak 60,7 juta m3 dipungut oleh pemegang izin HPH melalui sistem tebang pilih. Sedangkan, 83 juta m3 merupakan hasil pembukaan lahan untuk pengembangan Hutan Tanaman Industri, perkebunan kelapa sawit dan karet, serta pertambangan.

Faktanya, produksi kayu yang tercatat tersebut, jauh lebih rendah daripada volume kayu yang ditebang dari hutan alam Indonesia. Hasil dari model kuantitatif kajian menunjukkan, total produksi kayu yang sebenarnya selama 2003-2014 mencapai 630-772 juta m3.

Angka tersebut menunjukkan, statistik dari Kementerian LHK hanya mencatat 19-23 persen dari total produksi kayu selama periode studi, sedangkan 77-81 persen tidak tercatat. Dari selisih perhitungan volume produksi kayu selama periode tersebut dapat diketahui terjadinya kerugian negara.

Jika mengacu pada potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari dana reboisasi dan komponen hutan alam dari provisi sumber daya hutan, pemerintah telah memungut sebesar Rp 31 triliun.

Namun, mengacu pada perhitungan kajian KPK, seharusnya PNBP yang dipungut sebesar Rp 93 triliun-Rp 118 triliun. Artinya, ada kerugian sebesar Rp 63 triliun-Rp 87 triliun.

Di luar soal PNBP, negara juga menderita

kerugian dari nilai komersial kayu yang tidak tercatat. Sebab, hasil hutan kayu yang terdapat pada kawasan hutan di bawah penatausahaan pemerintah merupakan aset negara.

Menurut hukum Indonesia, kayu yang tidak tercatat menjadi aset negara yang dicuri dan uang dari hasil penjualan kayu bisa dianggap sebagai kerugian negara atau hasil kejahatan. Nilai komersial domestik untuk produksi kayu yang tidak tercatat selama periode tersebut sangat fantastis, mencapai Rp 598 triliun-Rp 799 triliun.

Dahsyatnya penggundulan hutan dan besarnya kerugian negara tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya korupsi di sektor kehutanan, baik di tingkat perizinan, perencanaan, maupun pengawasannya. Proses hukum yang telah dilakukan oleh KPK memperkuat gambaran itu.

Sepanjang 2002 hingga 2015, terdapat 26 pelaku korupsi kejahatan kehutanan yang ditindak oleh KPK. Nilai kerugian negara dari ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Salah satu contohnya adalah kasus Tengku Azmun Jaafar, bupati Pelalawan terkait perizinan hutan yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun.

Kerugian negara ini belum termasuk kerugian akibat bencana ekologis sebagai dampak dari penghancuran hutan juga hilangnya sumber ekonomi masyarakat, tatanan sosial, dan budaya dari masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan, bahkan identitas dirinya melekat pada alam, seperti masyarakat adat.

Pernyataan KPK dalam kasus korupsi Nur Alam yang menyebutkan, kerusakan lingkungan hidup sebagai kerugian negara dapat menjadi momentum untuk mengubah cara pikir pengurus negara dalam menilai kerugian negara.

Berkaca dari dampak serius bagi masyarakat dan negara yang disebabkan oleh penggundulan hutan dan kerusakan hutan termasuk yang dipicu kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan, sudah selayaknya jika isu-isu lingkungan hidup menjadi agenda strategis bagi para capres dan cawapres.

Kabar baiknya, Komisi Pemilihan Umum telah memasukkan isu lingkungan hidup dalam tema debat capres/cawapres. Keberpihakan terhadap agenda penyelamatan lingkungan hidup dan perbaikan tata kelola sumber daya alam tentu bukan sekadar formalitas: adanya debat tema lingkungan hidup.

Namun, lebih dari itu, karena tidak punya waktu yang lebih lama untuk segera memutuskan agenda prioritas penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup. Bagi kedua pasang capres dan cawapres, isu lingkungan hidup tidak hanya penting dibahas, tetapi juga perlu diperjuangkan.

Apalagi, bagi generasi milenial sebagai pemilih pemula. Isu-isu lingkungan hidup ini tentu akan penting bagi para pemilih milenial. Mereka yang akan merasakan dampak berkepanjangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global pada masa mendatang jika tidak diantisipasi dari sekarang. ■